

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Gaizka Akbar Rafsanjani¹, Marthin Susanto M², Asmak UI Hosna³

gaizkaakbarrafsanjani@gmail.com¹, atingsusanto@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang kompleks di banyak negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, serta untuk mengevaluasi efektivitas strategi penegakan hukum yang ada. Metode penelitian ini melibatkan analisis literatur dan data empiris untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut meliputi masalah keamanan, kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran dan edukasi, serta kompleksitas struktur kejahatan. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kerjasama antara lembaga penegak hukum, sekolah, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah, termasuk peningkatan sumber daya, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait.

Kata Kunci: Narkotika, Sekolah, Edukasi, Kesadaran.

Abstract

Law enforcement against narcotics crimes in the school environment is a complex problem in many countries. This research aims to identify the main challenges faced by law enforcement in dealing with narcotics trafficking in educational environments, as well as to evaluate the effectiveness of existing law enforcement strategies. This research method involves analysis of literature and empirical data to gain a comprehensive understanding of this issue. The research results show that these challenges include security problems, lack of resources, lack of awareness and education, and the complexity of the crime structure. In addition, the effectiveness of law enforcement is also influenced by cooperation between law enforcement agencies, schools and the community. This research provides policy recommendations to improve law enforcement and prevent drug abuse in the school environment, including increasing resources, increasing awareness, and increasing cooperation between related institutions.

Keywords: *Narcotics, School, Education, Awareness*

PENDAHULUAN

Tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di lingkungan sekolah merupakan isu yang mendesak dan kompleks. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendidik, namun kehadiran narkotika mengancam kesejahteraan dan keselamatan siswa serta proses pembelajaran. Dalam konteks ini, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, mulai dari deteksi dini, intervensi, hingga penegakan hukum secara efektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.

Tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di lingkungan sekolah melibatkan berbagai aspek yang kompleks. Salah satunya adalah masalah deteksi dini, di mana pengenalan awal terhadap keberadaan narkotika di sekolah seringkali sulit dilakukan karena sifat rahasia dan terselubung dari kegiatan tersebut. Selain itu, intervensi yang

efektif juga menjadi kendala, mengingat adanya faktor-faktor seperti stigma, resistensi dari pihak terkait, dan sulitnya mengakses sumber daya untuk rehabilitasi. Penegakan hukum sendiri di lingkungan sekolah sering kali menemui hambatan dalam hal pengumpulan bukti yang cukup, perlindungan terhadap korban, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil bagi pelaku. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Metode penelitian ini bersifat normatif dengan memanfaatkan studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari dokumen primer dan dokumen sekunder dari berbagai sumber yang ada. metode observasi partisipatif, wawancara dengan petugas kepolisian, guru, dan siswa, analisis dokumen kebijakan, dan survei terhadap persepsi dan pengalaman siswa terkait narkoba di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelundupan dan Peredaran Narkoba

Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyelundupan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah, permasalahan tersebut meliputi aktivitas ilegal membawa dan mendistribusikan narkoba di sekitar atau di dalam area sekolah. Ini mencakup tindakan menyembunyikan narkoba di dalam barang bawaan, menggunakan jasa penyelundup, atau mengedarkan narkoba kepada siswa di lingkungan sekolah.

Dampaknya sangat serius. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan siswa secara langsung dengan meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Hal ini dapat mengganggu proses pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif, dan meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminal lainnya. Tantangan dalam penegakan hukum meliputi kesulitan dalam mendeteksi kegiatan penyelundupan dan peredaran narkoba, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta upaya pencegahan yang mungkin tidak cukup efektif tanpa kerjasama aktif antara sekolah, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Upaya penegakan hukum harus mencakup patroli keamanan rutin, pemeriksaan acak di sekitar area sekolah, kerjasama erat dengan pihak sekolah untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan, serta penyuluhan kepada siswa tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba.

Tujuan utama dari upaya penegakan hukum ini adalah untuk melindungi siswa, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, produktif, dan bebas dari kejahatan. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pihak sekolah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini.

Keterlibatan Siswa

Merujuk pada masalah yang timbul ketika siswa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Ini mencakup siswa yang menjadi pengguna, pengedar, atau korban penyalahgunaan narkoba.

Keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan serius dalam konteks penegakan hukum di lingkungan sekolah. Siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menghadapi risiko kesehatan, sosial, dan akademik yang signifikan, dan juga dapat menjadi sumber gangguan bagi lingkungan belajar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkotika meliputi:

1. Tekanan dari teman sebaya,
2. Masalah keluarga,
3. Ketidakstabilan emosional,
4. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali, serta
5. Pengaruh lingkungan yang merangsang penggunaan narkotika.

Dampak dari keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkotika sangat serius. Selain risiko kesehatan yang ditimbulkannya, seperti penurunan kinerja akademik, gangguan perilaku, dan kerusakan otak, keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkotika juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak kondusif bagi siswa lainnya.

Penegakan hukum terhadap keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan yang holistik. Ini meliputi pencegahan dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkotika, deteksi dini melalui pengawasan dan pemeriksaan yang ketat di sekolah, intervensi dengan memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa terlibat, serta penegakan aturan sekolah yang tegas terhadap pelanggaran terkait narkotika.

Selain itu, perlindungan siswa yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga menjadi prioritas. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa yang rentan, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan intervensi.

Dengan memahami kompleksitas dan dampak dari keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkotika, lembaga pendidikan dan penegak hukum perlu bekerja sama secara efektif untuk melindungi siswa, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

Pencegahan dan Edukasi

Merupakan aspek penting dalam mengatasi tantangan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.

Pencegahan dan edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika serta memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghindari terlibat dalam perilaku tersebut. Upaya pencegahan biasanya melibatkan berbagai kegiatan, termasuk program pendidikan, seminar, lokakarya, kampanye anti-narkotika, dan penyuluhan yang diselenggarakan di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang risiko dan bahaya penyalahgunaan narkotika, serta mengajarkan siswa cara mengidentifikasi tekanan dari teman sebaya dan bagaimana cara menolak tawaran narkotika.

Selain itu, edukasi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum dan konsekuensi hukum dari terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ini dapat meliputi penjelasan tentang undang-undang narkotika, sanksi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku, serta dampaknya terhadap masa depan mereka, seperti penyalahgunaan narkotika dapat merusak rekam jejak pendidikan dan karir mereka.

Pentingnya pencegahan dan edukasi tidak bisa diabaikan, karena upaya ini dapat membantu mengurangi insiden penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung. Namun, tantangan dalam pencegahan dan edukasi termasuk pembentukan program yang efektif dan relevan, serta memastikan partisipasi aktif dan dukungan dari semua pihak terkait, termasuk siswa, orang tua, guru, staf sekolah, dan masyarakat.

Kerjasama Antar Instansi

Pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Kerjasama antar instansi menjadi kunci dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah karena masalah ini melibatkan berbagai aspek yang melintasi batas-batas institusi. Kerjasama ini melibatkan pihak sekolah, kepolisian, pemerintah daerah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan lainnya.

Salah satu bentuk kerjasama yang penting adalah pertukaran informasi antara pihak-pihak terkait, seperti pertukaran data tentang kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan sekolah, informasi tentang pelaku atau jaringan narkotika yang beroperasi di sekitar sekolah, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan lembaga penegak hukum untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap situasi yang berkembang. Selain itu, kerjasama antar instansi juga melibatkan pembentukan tim gabungan atau forum koordinasi yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga terkait. Tim ini bertugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan, penegakan hukum, dan intervensi terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.

Selain itu, kerjasama antar instansi juga melibatkan penyediaan sumber daya dan dukungan bersama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Ini dapat berupa penyediaan personel, peralatan, anggaran, atau dukungan teknis lainnya. Kerjasama antar instansi tidak hanya penting untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika secara spesifik, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung secara keseluruhan. Dengan bekerja sama secara sinergis, berbagai pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas upaya mereka dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.

Perlindungan Siswa

Upaya untuk melindungi siswa dari pengaruh dan risiko penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah serta memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.

Perlindungan siswa dalam konteks penyalahgunaan narkotika melibatkan beberapa aspek:

1. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Salah satu aspek perlindungan siswa adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hal ini melibatkan penyuluhan kepada siswa tentang bahaya narkotika, memberikan informasi tentang konsekuensi dari penggunaan narkotika, serta memberikan keterampilan dan strategi untuk mengatasi tekanan dari teman sebaya yang mendorong penggunaan narkotika.
2. Deteksi Dini, Perlindungan siswa juga mencakup deteksi dini terhadap tanda-tanda penyalahgunaan narkotika. Guru, staf sekolah, dan petugas keamanan harus dilatih untuk mengenali perilaku atau tanda-tanda fisik yang mungkin menunjukkan bahwa seorang siswa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan pencegahan atau intervensi dapat diambil dengan cepat.
3. Intervensi dan Rehabilitasi, Bagi siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, perlindungan siswa melibatkan intervensi yang cepat dan efektif serta akses terhadap layanan rehabilitasi yang sesuai. Ini bisa meliputi konseling, program rehabilitasi, dan dukungan sosial yang bertujuan untuk membantu siswa keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkotika dan kembali ke jalur yang positif.
4. Penguatan Lingkungan Sekolah, Perlindungan siswa juga mencakup penguatan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Ini melibatkan penegakan aturan

sekolah yang ketat terkait dengan narkoba, pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas di lingkungan sekolah, serta kerjasama antara staf sekolah, siswa, dan orang tua untuk menciptakan budaya sekolah yang tidak mentolerir penyalahgunaan narkoba.

5. Dukungan dan Pendidikan Orang Tua, Perlindungan siswa juga membutuhkan dukungan dan pendidikan kepada orang tua agar mereka dapat memainkan peran yang aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak mereka. Ini bisa meliputi penyuluhan tentang tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, memberikan saran tentang cara berkomunikasi dengan anak-anak tentang bahaya narkoba, serta memberikan dukungan kepada orang tua yang memiliki anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Melalui upaya-upaya perlindungan siswa yang holistik dan terkoordinasi, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, mendukung, dan bebas dari pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan siswa serta meningkatkan prestasi akademik mereka.

Hambatan Hukum dan Implementasi Kebijakan

Menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Beberapa hambatan yang mungkin muncul meliputi ketidakjelasan dalam peraturan hukum terkait penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, keterbatasan wewenang lembaga pendidikan atau kepolisian, kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan yang memadai dalam sistem penegakan hukum, kebijakan yang tidak konsisten atau tidak koheren, serta tantangan hukum dalam penegakan aturan sekolah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah dapat diambil, seperti penyusunan dan penguatan peraturan hukum yang jelas terkait penanganan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah, peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, peningkatan alokasi sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan, edukasi terkait hukum dan kebijakan kepada seluruh pihak terkait, serta evaluasi dan revisi kebijakan secara berkala agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di lapangan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan hukum dan implementasi kebijakan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah dapat menjadi lebih efektif dan terarah, menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung bagi semua siswa.

Pendekatan Restoratif

Strategi alternatif dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Pendekatan ini berfokus pada rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi siswa ke dalam lingkungan belajar setelah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan restoratif bertujuan untuk tidak hanya menghukum siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi juga untuk memahami akar masalah yang mendasarinya dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki perilaku mereka serta mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam praktiknya, pendekatan restoratif dapat melibatkan beberapa langkah, seperti:

1. Pendekatan Kolaboratif, Mengadakan pertemuan antara siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, orang tua, guru, dan administrator sekolah untuk membahas konsekuensi dari perilaku tersebut dan merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Pemulihan dan Rehabilitasi, Memberikan akses kepada siswa untuk mendapatkan layanan kesehatan mental, konseling, atau program rehabilitasi untuk membantu mereka keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkoba dan mengatasi masalah

yang mendasarinya.

3. Pembinaan dan Pemantauan, Menetapkan program pembinaan dan pemantauan yang dirancang untuk mendukung siswa dalam perubahan perilaku mereka, termasuk pengawasan ketat, konseling reguler, dan dukungan sosial.
4. Reintegrasi, Setelah siswa menyelesaikan program rehabilitasi dan pembinaan, mereka diberi kesempatan untuk kembali ke lingkungan sekolah dengan dukungan yang diperlukan untuk mengintegrasikan kembali ke dalam komunitas belajar.

Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan dan perbaikan, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Ini bertentangan dengan pendekatan punitif yang hanya berfokus pada hukuman, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mendasari perilaku siswa.

Dengan menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk melakukan perubahan positif dan menghindari perilaku yang merugikan diri mereka sendiri dan lingkungan belajar.

SIMPULAN

Pada pembahasan di atas memberikan penjelasan berbagai aspek penting dalam menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pencegahan. Dari penyelundupan narkoba hingga pendekatan restoratif, setiap topik menunjukkan kompleksitas masalah tersebut dan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menanggulangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional " Penegakan Hukum Kasus Narkoba Dengan Pendekatan Restorative Justice, Bagaimana Penerapannya?". 12 Mei 2022 <https://kepri.bnn.go.id/penegakan-hukum-kasus-narkoba-pendekatan-restorative-justice-bagaimana/>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). "Penyelundupan Narkoba di Lingkungan Sekolah: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum". Jurnal Kepabeanan dan Cukai, <https://www.beacukai.go.id/>
- Imran1, Fadilah Nur& Bustami Dachran " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak ". Indonesia Journal of Criminal Law, 27-Mei-2020, <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Pedoman Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240133/permen-pppa-no-7-tahun-2019>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikbud>
- Purbanto Hardy & Hidayat Bahril " Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam". Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/11412>
- Soesilo, D. (Ed.). (2018). Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Sekolah: Pendekatan Hukum dan Sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.